KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI
http://kliping.dpr.go.id

Judul : OTT KPK Cuma Drama
Tanggal : Kamis, 15 Februari 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 1-7

REKOMENDASI
PANSUS HAK ANGKET KPK



ASPEK KELEMBAGAAN

1. KPK diminta sempurnakan struktur organisasinya, agar cerminkan tugas dan kewenangan KPK sebagaimana UU Nomor 30/2002 tentang KPK, yang meliputi koordinasi, supervisi, penindakan, pencegahan, dan monitoring.
2. Tingkatkan kerja sama dengan lembaga lainnya, seperti BPK, LPSK, PPATK, Komnas HAM serta perbankan, agar optimal, terintegrasi, dan bersinergi dengan baik.
3. Membentuk lembaga pengawas independen yang beranggotakan unsur internal KPK dan eksternal yang berasal dari tokoh berintegritas untuk check and balances



CHARLIE/INDOPOS

KETUA DPR Bambang Soesatyo menyatakan, dirinya sedang berkabung, lantaran revisi UU MD3 menuai kritik dan menjadi kontroversi di masyarakat. Ia pun kemudian mengenakan pakaian serba hitam saat memimpin sidang paripurna DPR penutupan masa persidangan III tahun sidang 2017–2018, Rabu. "Kami justru butuh dikritik," kata Bamsoet, bersamaan dengan tampilan di layar bertuliskan "Kami Butuh Kritik." Di sidang ini juga disampaikan rekomendasi Pansus Hak Angket KPK.

OTT KPK Cuma Drama

Sebarkan Seribu Pemantau ke Daerah, Fahri: Nggak Guna!

JAKARTA–Ditangkapnya sejumlah kepala daerah peserta Pilkada serentak 2018 oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendapat sorotan sejumlah kalangan. Pertanyaan besarnya adalah, mengapa penangkapan justru saat kepala daerah tersebut sedang mengikuti proses pilkada. Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menilai, lembaga antirasuah tersebut sedang memainkan drama. Dengan segala maaf, dia harus menganggap KPK sedang mengalami kematian fungsi dan eksistensi.

"Seperti sekarang, dia (KPK) ngejar-ngejar bupati yang lagi pilkada, Itu tidak ada guna dan manfaatnya. Dia akan membuat drama-drama seolah-olah efek jera, bohong itu," kata Fahri di gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/2).

Menurut dia, KPK sudah salah mendefinisikan korupsi. Kemudian, KPK menunjukkan eksistensi memberantas korupsi dengan cara melakukan penangkapan.

"*Ngacolah* caranya membuat drama. Sudah tidak ada, sudah tidak laku!" tegas Fahri.

Fahri mengatakan, KPK sudah menjadi beban republik. Sekarang tergantung Presiden Joko Widodo untuk membubarkan KPK jika memang tidak diperlukan lagi.

Telebih sudah ada hasil lengkap rekomendasi Pansus Hak Angket KPK. "Terserah Presiden, mau terima atau tidak," katanya lagi.

Menurut Fahri, harus ada rekonsiliasi. Ada dua cara yang bisa dilakukan yakni mengikuti metode di Hongkong atau Korea Selatan. Metode Hongkong, yakni KPK sebagai lembaga investigatif ■

» Baca KTT...7

POLLING HEADLINE

Apakah kamu sependapat, banyaknya kepala daerah peserta pilkada yang ditangkap KPK, disebut-sebut hanyalah sandiwara?

ASPEK KEWENANGAN

1. berkoordinasi dengan polisi-jaksa, serta supervisi terhadap polisi-jaksa, untuk bangun jaringan kerja yang kuat. Juga tempatkan polisi-jaksa sebagai counterpartner.
2. Agar lebih memperhatikan prinsip-prinsip hak asasi manusia dan mengacu pada hukum acara pidana yang berlaku serta memperhatikan pula peraturan perundang-undangan lainnya. Seperti undang-undang perlindungan saksi dan korban, hak asasi manusia, dan tata kelola yang mengatur rumah penyimpanan benda sitaan negara.
3. Membangun sistem pencegahan yang sistematik, yang cegah korupsi kembali agar tidak terulang kembali.

ASPEK ANGGARAN

1. tingkatkan dan perbaiki tata kelola anggarannya sesuai rekomendasi dari BPK.
2. DPR RI akan mendorong peningkatan anggaran KPK untuk optimalkan anggaran alam fungsi pencegahan.

ASPEK TATA KELOLA SDM

1. Agar perbaiki tata kelola SDM dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan.
2. Diminta semakin transparan dan terukur dalam proses pengangkatan, promosi, mutasi, rotasi, hingga pemberhentian SDM KPK mengacu pada undang-undang.

OTT KPK Cuma Drama

» Sambungan dari halaman 1

"Sudah, titik. Jangan menuntut dia (KPK) punya macam-macam (kewenangan) seperti mengurus JC (justice collaborator), berkongkalingkong dengan terpidana," ujarnya.

Dia mengkritik KPK sekarang sudah melakukan semacam operasi intelijen dengan mengintip semua orang. Dia mencontohkan Setya Novanto sudah disadap sejak enam tahun lalu. "Ya kan ngaco, mana ada di negara orang enam tahun diintip," katanya.

Menurut Fahri, di belahan dunia mana pun sepertinya sudah tidak ada lagi yang seperti itu. Mungkin, tambahnya, cuma ada di Korea Utara. "Kuba saja sudah berubah, tinggal di Korea Utara. Jadi, KPK itu cocoknya pindah ke Korea Utara saja, jadi aparatnya Kim Jong-Un cocok dia," katanya.

Sedangkan metode Korea Selatan, kata dia, KPK di sana digabung dengan Ombudsman, Komnas HAM dan LPSK dalam sebuah wadah Anti Corruption and Human Right Commission. "Nah, ini lembaga complain. Jadi setiap ada masalah lapor," katanya.

Dengan demikian, kata dia, indeks persepsi korupsi (IPK) dan citra negara Korsel semakin baik. Perekonomian juga semakin bagus. Penegakan hukum tetap berjalan.

Kondisi ini berbanding terbalik dengan Indonesia. Menurut Fahri, IPK masih kalah sama Timor Leste. Lalu, KPK mau menunjukkan eksistensi diri dengan melakukan penangkapan sana-sini termasuk bupati yang ikut Pilkada.

"Ya kan ada tuh di NTT itu kasihan. Itu orang belum jadi gubernur dia bilang nanti saya minta sumbangan dong mobil buat pilkada, nanti kalo saya jadi gubernur saya kasih proyek, itu ditangkap," katanya.

Sebagaimana diketahui, dalam beberapa waktu belakangan ini, sudah banyak kepala daerah peserta Pilkada 2018 yang dicokok KPK. Pertama, yakni penangkapan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Kalimantan Timur (Kaltim), Rita Widyasari. Calon Gubernur Kaltim dari Partai Golkar tersebut ditangkap atas tuduhan terima suap.

Dari Kaltim berembus kabar bahwa Rita ditangkap KPK, karena calon kuat Gubernur Kaltim itu tidak bersedia maju di Pilkada bersama figur yang didukung Jakarta. Karena penolakan itu, tak lama kemudian, Rita ditangkap KPK.

"Oh tidak benar itu. Bu Rita menjadi tersangka karena ditemukan sejumlah bukti bahwa yang bersangkutan menerima uang suap. Tidak ada soal politik," kata Basariah Panjaitan, salah seorang wakil ketua KPK, kepada INDOPOS beberapa waktu lalu.

Selain Rita, kepala daerah lainnya yang sudah mengenakan rompi oranye, yakni Bupati Subang, Jawa Barat Imas Aryumningsih, setelah sebelumnya menahan Bupati Jombang, Jawa Timur, Nyono Suharli Wihandoko, dan Bupati Ngada, Nusa Tenggara Timur, Marianus Sae.

Rabu (14/2) kemarin, Basariah mengakui, pihaknya menerjunkan 1.000 karyawan KPK, yang di dalamnya termasuk para penyidik KPK, untuk memantau daerah yang melaksanakan pilkada serentak 2018. "Jumlah pegawai KPK hampir 1.500, bukan penyidik semua (yang disebar). Tapi kalau penyelidik, ya (disebar). Bila perlu tidak 1.000 tapi lebih, supaya bisa mengawal Pilkada ini bisa berjalan sebersih mungkin," tegas Basaria kepada INDOPOS.

Penyidik dimaksudnya adalah Tim Koordinasi dan Supervisi (Korsup) yang disiapkan KPK di seluruh Provinsi. Setelah langkah pencegahan melalui Korsup di seluruh daerah, juga melibatkan pihak-pihak terkait di pemerintahan setempat.

Tapi kenapa banyak OTT terhadap kepala daerah peserta Pilkada? Dijelaskan Basaria, memang penindakan merupakan bagian yang ada dalam upaya pencegahan terintegrasi melalui tim Korsup yang ada. "Kalau di sana (daerah), mereka lebih dekat dan melihat sendiri. Mereka masuk ke dalam sistem. Jika informasi (korupsi) itu hanya dari masyarakat, tentu berproses. Namun jika info itu berasal dari Korsup di seluruh provinsi, maka akan diproses lebih cepat karena lebih akurat," bebernya.

Ia mengakui, dalam beberapa hari ke depan, bisa saja jumlah kepala daerah yang ditangkap KPK terus bertambah. "Bisa jadi OTT akan lebih besar, karena tim ada di seluruh Provinsi," katanya.

Namun demikian, KPK tetap mengingatkan kepada seluruh kepala daerah maupun calon kepala daerah agar tidak terjebak dalam politik uang. Kontestan politik diharapkan dapat mengikuti Pilkada secara bersih dan beretika. **(boy/jpnn/egp)**